

**ANALISIS PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR, DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Fade Ardhana

Nim : 20313125

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

Analisis pengaruh PDRB, Pendidikan, Infrastruktur dan Penegluaran Pemerintah terhadap
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ilmu Ekonomi,
Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Fade Ardhana
Nomor Mahasiswa : 20313125
Jurusan : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UIR. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2024

Penulis,



Fade Ardhana

PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

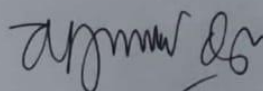
Analisis pengaruh PDRB, Pendidikan, Infrastruktur, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama : FADE ARDHANA
Nomor Mahasiswa : 20313125
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

BERITA ACARA SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

uh PDRB, Pendidikan, Infrastruktur, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan B

Disusun oleh : FADE ARDHANA

Nomor Mahasiswa : 20313125

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 06 Maret 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D

Penguji : Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya dan memberikan kelancaran serta kemudahan sehingga dalam proses penulisan, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Dalam proses penyusunan Skripsi ini peneliti diberikan motivasi serta dukungan yang tiada hentinya. Oleh karena itu penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang tersayang, yaitu:

1. Orang tua ku tersayang, Bapak H. Agus Fakhrol dan Ibu Hj.Yul Yani yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat yang tiada hentinya. Terimakasih atas perjuangan yang telah diberikan kepada anaknya baik moril maupun materil sehingga anaknya bisa mencapai di titik sekarang. Semoga hal ini menjadi langkah awal dalam membuat Ibu dan Bapak bahagia seterusnya.
2. Kakak ku tersayang Feny Ambarsari, S.Pd. yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada adiknya dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Kembaranku tersayang Farah Ardhani yang selalu ada dalam suka maupun duka, memberikan semangat, motivasi dan ikut serta membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Keluarga Besar Kakek dan Nenek yang tidak dapat disebut satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya.
5. Dosen pembimbing yang telah membantu dengan tekun dan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya dan memberikan kelancaran serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis pengaruh PDRB, Pendidikan, Infrastruktur, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**. Tidak lupa juga kita haturkan shalawat serta salam kepada junjungan dan tauladaan, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Penulisan Skripsi ini diselesaikan guna melengkapi Tugas Akhir Program Sarjana Setrata satu (S1) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, peneliti melalui banyak kendala-kendala dan tidak akan selesai jika tanpa adanya dukungan serta doa dari berbagai pihak dalam kerjasama, bantuan, serta bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

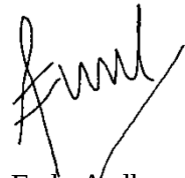
1. Yth. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Yth. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Kepala Prodi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Bapak Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, membantu serta senantiasa membimbing sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
4. Yth. Ibu Dra. Sarastri Mumpuni Ruchba, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mendamping selama perjalanan masa perkuliahan.
5. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Akademik, Staf Tata Usaha dan Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Orang tua tersayang, Bapak H. Agus Fakhrol dan Ibu Hj. Yul Yani yang telah berusaha, mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada hentinya yang mungkin tidak bisa terbalaskan.
7. Kakak ku tercinta, Feny Ambarsari, S.Pd. dan Kembaran Ku Farah Ardhani yang telah memberikan semangat, motivasi, ikut serta membantu dan dukungan yang tiada hentinya dalam menyusun Skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan perantauan Astri, Rizka, Nabila, Aulia, Natasya dan Sinta yang selalu memberikan semangat, membantu dan berjuang bersama selama masa perkuliahan.

9. Teman-teman seperbimbingan, Farah, Oktaria, Oktavia, Aulia, Lutfiar, Nabilah, Alfinda, Tegar, Jauharil dan Kamal yang telah membantu, berjuang bersama-sama dan memberikan dukungan dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
10. Teman-teman KKN Unit 388 yang saling berbagi dalam suka dan duka.
11. Seluruh Mahasiswa Angkatan 2020 Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas bimbingan, kerjasama dan dukungan selama masa perkuliahan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
12. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang tanpa tiada hentinya dalam menjalankan masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan dalam penulisan, maka dari itu peneliti menerima kritik dan saran dari pembaca dan dapat dijadikan masukan agar penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 Februari 2024

Penulis,



Fade Ardhana

NIM: 20313125

HALAMAN MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan perpohonan, melainkan mengujikan kekuatan akarnya”.

(Ali bin Abi Thalib)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”.

(Imam Syafi’i)

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang – orang yang khusyu”.

(Q.S Al-Baqarah: 45)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Kata Pengantar.....	v
Halaman Motto	vii
Halaman Daftar isi	viii
Halaman Daftar Tabel.....	xi
Halaman Daftar Grafik	xii
Halaman Gambar	xiii
Halaman Lampiran.....	xiv
Halaman Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	16
2.1 Kajian Pustaka	16
2.2 Landasan Teori.....	18
2.2.1 Kemiskinan	18
2.2.2 PDRB	20
2.2.3 Pendidikan.....	23
2.2.4 Infrastruktur	24
2.2.5 Pengeluaran Pemerintah.....	25
2.3 Hubungan Antara Variabel	26
2.3.1 Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan	26
2.3.2 Hubungan Pendidikan Terhadap Kemiskinan	27
2.3.3 Hubungan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan	27
2.3.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan	27
2.4 Hipotesis	28

2.5 Kerangka Pikir	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN	30
3.1 Jenis Dan Sumber Pengumpulan Data	30
3.2 Pengertian Operasional Variabel	30
3.2.1 Kemiskinan	30
3.2.2 PDRB	30
3.2.3 Pendidikan.....	31
3.2.4 Infrastruktur	31
3.2.5 Pengeluaran Pemerintah.....	31
3.3 Metode Analisis	32
3.3.1 Common Effect Model	32
3.3.2 Fixed Effect Model	33
3.3.3 Random Effect Model.....	34
3.4 Pemilihan Model Terbaik	34
3.4.1 Uji Chow	35
3.4.2 Uji Lagrange Multiplier	35
3.4.3 Uji Hausman	35
3.5 Uji Statistik	36
3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	36
3.5.2 Uji F	36
3.5.3 Uji T	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	38
4.2 Estimasi Regresi Data Panel	40
4.2.1 Common Effect Model	40
4.2.2 Fixed Effect Model	41
4.2.3 Random Effect Model.....	41
4.3 Pemilihan Model.....	42
4.3.1 Uji Chow	42
4.3.2 Uji Lagrange Multiplier	43
4.3.3 Uji Hausman	43
4.4 Evaluasi Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model (FEM)	44
4.5 Pengujian Hipotesis	45
4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	45

4.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	45
4.5.3 Uji Parsial (Uji t).....	45
4.5.3.1 Variabel PDRB	46
4.5.3.2 Variabel Pendidikan.....	46
4.5.3.3 Variabel Infrastruktur.....	46
4.5.3.4 Variabel Pengeluaran Pemerintah.....	46
4.6 Pembahasan Hasil	47
4.6.1 Perbedaan Intercept.....	47
4.6.2 Analisis Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan.....	48
4.6.3 Analisis Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan	48
4.6.4 Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan.....	49
4.6.5 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
a. Kesimpulan	51
b. Implikasi	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera periode 2021-2022.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022	5
Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022	7
Tabel 1.4 Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022	9
Tabel 1.5 Infrastruktur Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022	10
Tabel 1.6 Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022	12
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	38
Tabel 4.2 Hasil Regresi Model Common Effect.....	40
Tabel 4.3 Hasil Regresi Metode Fixed Effect.....	41
Tabel 4.4 Hasil Regresi Metode Random Effect	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow	42
Tabel 4.6 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	43
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman.....	44
Tabel 4.8 Hasil Model Terbaik	44
Tabel 4.9 Hasil Uji t.....	46
Tabel 4.10 Koefisien Model Fixed Effect.....	47

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Miskini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022.....	4
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Data Kemiskinan, PDRB, Pendidikan, Infrastruktur dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022	56
LAMPIRAN 2 Common Effect Model.....	57
LAMPIRAN 3 Fixed Effect Model	58
LAMPIRAN 4 Random Effect Model.....	58
LAMPIRAN 5 Uji Chow	59
LAMPIRAN 6 Uji Lagrange Multiplier	59
LAMPIRAN 7 Uji Hausman	60

HALAMAN ABSTRAK

Di Indonesia dan juga di negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial. Kemiskinan merupakan permasalahan yang rumit dan memiliki banyak segi. Indonesia adalah negara yang termasuk salah satu negara yang mempunyai masalah kemiskinan. Kemiskinan terus berlanjut karena kebutuhan manusia semakin meningkat, dan semakin banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai permasalahan kemiskinan adalah Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, Pendidikan, Infrastruktur, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan sumber data dari data skunder. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah Kemiskinan sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah PDRB, Pendidikan, Infrastruktur dan Pengeluaran Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan Infrastruktur tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kata kunci: Kemiskinan, PDRB, Pendidikan, Infrastruktur dan Pengeluaran Pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan banyak pulau dan berbagai etnis. Negara ini merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar dan populasi terbesar di dunia, menempati urutan keempat di dunia dan menempati urutan kesepuluh di dunia. Salah satu tujuan negara yaitu ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Menciptakan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu cara untuk melakukan hal ini. Pendekatan ekonomi digunakan dalam banyak program pembangunan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Tidak hanya dengan menerapkan berbagai inisiatif pembangunan di tempat-tempat yang populasi penduduknya mirip dengan daerah dengan tingkat kesejahteraan miskin. Indikator utama pencapaian pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Ketika memilih strategi atau alat pembangunan, fokus utamanya harus pada seberapa baik strategi atau alat tersebut dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan suatu sektor untuk secara efektif menurunkan jumlah penduduk miskin yaitu diantaranya faktor utama digunakan untuk memilih sektor tersebut sebagai sektor yang menjadi fokus atau sektor pokok bagi pertumbuhan nasional. Jika pertumbuhan suatu sektor mempunyai pengaruh yang lebih kuat dibandingkan sektor lain dalam menurunkan jumlah penduduk miskin maka ini dapat dipercaya (Simatupang & Dermoredjo, 2003).

Di Indonesia dan juga di negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial. Kemiskinan merupakan permasalahan yang rumit dan memiliki banyak segi. Indonesia adalah negara yang termasuk salah satu negara yang mempunyai masalah kemiskinan. Jadi, upaya untuk pengentasan kemiskinan ini harus terkoordinasi, menyeluruh, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di semua bidang kehidupan. (Nasir, dkk 2008).

Meskipun kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang besar dinegara ini, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Seseorang atau sekelompok orang yang dianggap dalam masyarakat miskin ketika mereka tidak mampu melengkapi keperluan dasar semacam tempat tinggal, sandang, dan pangan

tanpa mampu memenuhi prasyarat finansial dan fisik yang menjamin tingkat kehidupan tertentu (Jacobus et al., 2018). Kemiskinan terus berlanjut karena kebutuhan manusia semakin meningkat, dan semakin banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai jumlah uang yang harus dikeluarkan masyarakat untuk kebutuhan non makanan seperti perumahan, Sandang, layanan Kesehatan, Edukasi, transportasi, serta barang dan jasa lainnya, selain kebutuhan kalori sebesar 2100 per hari. Pemerintah harus mengetahui semua komponen yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia sebelum mengetaskan kemiskinan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemiskinan adalah fokus utama pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia agar semua rencana pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut pandangan utama, kemiskinan diartikan dimana memiliki sedikit asset, sedikit keterlibatan dalam kelompok sosial dan politik, serta sedikit pengetahuan dan kemampuan. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menurunkan angka kemiskinan. Biaya Langsung Tunai (BLT) adalah strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

Sejak September 2012 hingga Maret 2023, angka kemiskinan di negara Indonesia secara umum mengalami penurunan secara keseluruhan baik per segi jumlah ataupun persentasenya selain bulan September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2022 yang mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang tergolong miskin di bulan September 2013, Maret 2015, dan September 2022 disebabkan oleh peningkatan harga bahan bakar sehingga menyebabkan peningkatan harga kebutuhan pokok. Namun, Ketika Indonesia dilanda pandemic Covid-19 pada bulan September 2020, terdapat keterbatasan mobilitas penduduk sebagai akibat dari peningkatan kuantitas serta proporsi masyarakat miskin antara bulan Maret dan September 2020 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Angka kemiskinan yang meningkat jelas merupakan hasil dari perlambatan ekonomi Indonesia. Karena ketidakmampuan mereka untuk menyerap kerugian akibat pandemi ini sebagian besar perusahaan besar memberhentikan karyawannya. Ini mengakibatkan tingkat pengangguran di Indonesia pada Maret 2020, meningkat sebesar 60 ribu orang. Seseorang menjadi miskin akibat

meningkatnya angka pengangguran karena tidak mempunyai sumber pendapatan utama. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan 1,28 juta kuantitas masyarakat miskin menjadi 26,42 juta di Maret 2020. Jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2019(Badan Pusat Statistik, 2020).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	
	2021	2022
Aceh	834	807
Sumatera Utara	1344	1268
Sumatera Barat	371	335
Riau	501	485
Jambi	294	279
Sumatera Selatan	1114	1045
Bengkulu	306	297
Lampung	1084	1002
Kepulauan Bangka Belitung	73	67
Kepulauan Riau	144	152

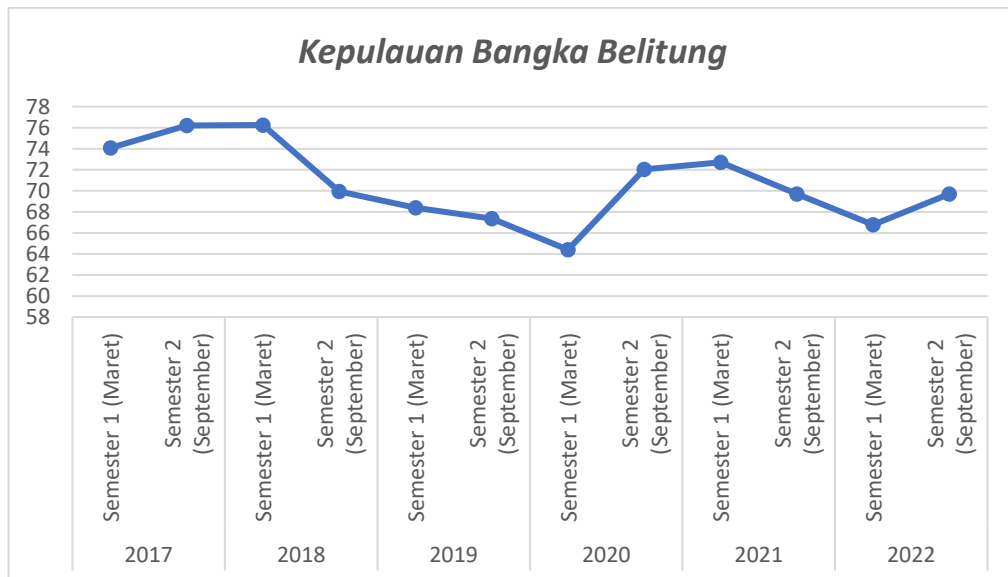
Sumber : Badan Pusat Statistik

Salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai permasalahan kemiskinan adalah Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung yang dahulu yaitu bagian dari Provinsi Sumatra Selatan namun kini sudah merdeka, adalah provinsi ke-31 di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembaharuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di area Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, presentase masyarakat miskin telah berangsur-angsur menurun selama 10 tahun lalu. Masalah ini diperkuat oleh peningkatan infrastruktur dan pendidikan di delapan wilayah kota atau kabupaten di Provinsi tersebut. Bangka Belitung yaitu salah satu provinsi di Indonesia yang saat ini sedang menghadapi kemiskinan. Pada tahun 2022, Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat kemiskinan sebesar 66,78 ribu jiwa. Menurut BPS, Indonesia mencapai persentase 2,616,1 ribu jiwa pada tahun 2022. Meski menduduki peringkat ke-32

pada tahun 2022, namun tingkat kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung masih tergolong rendah dibandingkan 34 Provinsi lainnya, berdasarkan data kemiskinan seluruh Provinsi di Indonesia. Sebaliknya, tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung menduduki peringkat ke sembilan se pulau Sumatera dalam hal kemiskinan jika dilihat dari keseluruhan wilayahnya. Dengan derajat kemiskinan paling teratas pada Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1,268 ribu jiwa disusul Sumatera Selatan sebesar 1,045 ribu jiwa, Lampung sebesar 1,002 ribu jiwa, Aceh sebesar 806,75 ribu jiwa, Riau sebesar 485,66 ribu jiwa, Sumatera Barat sebesar 335,21 ribu jiwa, Bengkulu sebesar 297,23 ribu jiwa, Jambi sebesar 279,37 ribu jiwa, Kepulauan Riau sebesar 151,68 ribu jiwa dan yang terakhir yaitu Kepulauan Bangka Belitung sebesar 66,78 ribu jiwa merupakan provinsi dengan angka terendah sepulau sumatera.

Grafik 1.1

Jumlah Penduduk Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 2017 - 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 hingga 2022. Total masyarakat miskin meningkat di tahun 2018 mencapai puncak sebanyak 76.260 ribu jiwa. Kapasitas organisasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan menjadi alasan dibalik hal

ini karena mereka tidak memiliki faktor produksi yang memadai dan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan keahlian kelompok masyarakat. Akibatnya, masyarakat belum mendapatkan hasil dari proses pembangunan (Nadhifah, 2018). Sejumlah negara mengalami guncangan ekonomi dampak dari wabah Covid-19 yang menghantam di tahun 2020 sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ini juga berdampak pada angka kemiskinan, yang merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Pada September 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai total masyarakat miskin sebanyak 72,05 ribu jiwa. Ini meningkat sebagai akibat dari upaya pemerintah untuk menerapkan program pemulihan ekonomi nasional. Selama satu tahun, jumlah penduduk miskin turun menjadi 69,70 ribu orang September 2021, dan kembali turun menjadi 69,69 ribu orang di September 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022

Wilayah Babel	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	16.45	18.02	16.52	15.41	16.19	14.50
Belitung	14.11	14.00	11.88	12.06	13.53	12.34
Bangka Barat	6.06	6.35	5.65	5.83	5.85	5.30
Bangka Tengah	11.39	11.12	9.80	9.64	10.03	9.61
Bangka Selatan	7.88	7.58	7.02	7.49	7.72	6.81
Belitung Timur	8.44	8.93	8.51	8.56	9.29	8.47
Pangkalpinang	9.76	10.27	9.00	9.40	10.10	9.76

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dibandingkan dengan Kabupaten Bangka pada tahun 2017 berjumlah 16,45 jiwa, Kabupaten Bangka Barat mempunyai total masyarakat

miskin yang sangat sedikit yakni 6,06 jiwa. Kabupaten Bangka pada tahun 2022 mempunyai penduduk miskin sebanyak 14,50 jiwa dibandingkan Kabupaten Bangka Barat sebanyak 5,30 jiwa yang merupakan jumlah penduduk miskin yang terendah pada tahun tersebut. Jumlah penduduk miskin yang berangsur menurun dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah ekspansi lapangan pekerjaan ke wilayah pelosok, yang menghasilkan peningkatan pendapatan.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu teknik mengatasi kemiskinan. Kemampuan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu disebut pertumbuhan ekonomi. Sumber-sumber pertumbuhan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat ditunjukkan dengan indikator – indikator semacam indeks pembangunan manusia yang sehat juga tersebar adil, dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin sebagai dampak dari pemerataan pembangunan ekonomi. Penurunan kemiskinan di suatu negara sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk menurunkan kemiskinan dan mengukur efektivitas pembangunan. Derajat kemiskinan yang banyak membuat kedamaian masyarakat menjadi kecil, yang kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Wongdesmiwati, 2009) melakukan penelitian yang mengungkapkan korelasi negatif antar tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, kemiskinan bakal mengecil seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kaitan ini memberitahukan betapa pentingnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mengecilkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yaitu prasyarat untuk mengurangi kemiskinan (A.Ridwan Siregar, 2008).

Salah satu ukuran ekspansi ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah singkatan dari nilai tambah bruto yang dihasilkan perekonomian daerah. Pemerintah menggunakan PDRB untuk mendukung pengambilan kebijakan, mengevaluasi hasil pembangunan, dan mengumpulkan data kinerja perekonomian daerah. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan menyumbang 5,22 persen dari total penduduk pada tahun 2016. Pada tahun 2017, PDRB meningkat seiring menurunnya proporsi penduduk

yang hidup dalam kemiskinan. Di tahun 2018, Bangka Belitung menghadapi kenaikan lagi, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan karena ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh peraturan pemerintah yang ketat. Akibatnya, smelter swasta di Bangka Belitung menjadi khawatir karena tidak dapat mengekspor logam timah, yang mengakibatkan penurunan jumlah produksi barang dan jasa. Secara ideal, sebaran PDRB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya juga mencerminkan sebaran penduduk. Pemerataan pembangunan dengan total masyarakat yang lebih banyak harus sejalan berserta tingkat PDRB yang banyak. Sebaran PDRB yang telah disesuaikan dengan jumlah penduduk dapat dilihat lebih jelas dengan menggunakan PDRB sebagai indikatornya.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Periode 2017 – 2022

Wilayah Babel	PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	935532 5.94	977803 2.33	1005878 8.63	9988799. 17	1073385 9.65	1125621 8.82
Belitung	596967 2.46	629086 3.35	6500417. 14	6352858. 79	6710006. 83	7093355. 47
Bangka Barat	967370 8.95	101771 99	1089522 2.51	1031221 2.39	1033299 6.45	1054042 2.63
Bangka Tengah	562061 4.96	581269 7.46	5883095. 61	5715596. 35	5987136. 71	6352639. 47

Bangka Selatan	576387 1.27	602420 5.32	6176844. 59	6057875. 86	6276797. 99	6469331. 04
Belitung Timur	511029 6.8	532611 5.79	5499978. 38	5465459. 44	5714794. 2	5931759. 93
Pangkalpinang	835848 1.92	878278 8.55	9069279. 72	8797128. 81	9611439. 98	1020834 0.29

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten/Kota di Belitung Timur memiliki tingkat PDRB paling rendah, sedangkan Kabupaten Bangka memiliki tingkat PDRB tertinggi. Tidak mengherankan bahwa sebagian besar orang di Kabupaten Bangka bekerja sebagai penambangan timah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga mereka bergantung pada hasil tambang mereka.

Salah satu dari tiga penyebab kemiskinan, berdasarkan Sharp (dalam Kuncoro, 2003), adalah kecilnya sumber daya manusia, yang bersumber pada rendahnya tingkat Pendidikan, karena hanya mereka yang berpendidikan yang mampu keluar dari kemiskinan, maka Pendidikan yaitu keperluan sangat penting bagi setiap orang. Tingkat Pendidikan yaitu salah satu metrik yang bisa mengungkapkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat Pendidikan yang makin tinggi tercermin dari sumber daya manusia yang makin baik. Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan sangat kuat sejak tawaran memberikan kesempatan untuk tumbuh melalui penguasaan kemampuan dan pengetahuan (Suryawati, 2005).

Penelitian ini mengkaji Pendidikan dari rata – rata lama sekolah. Kualitas penduduk ditentukan oleh rata – rata lama sekolah formal yang menjadi indikator pencapaian Pendidikan. Pendidikan dan kemampuan seseorang akan bertambah seiring dengan bertambahnya pendidikan sehingga berdampak pada peningkatan produksinya. John Stuart Mill berpendapat bahwa perlu ada upaya untuk meningkatkan pendidikan sehingga orang dapat menjadi lebih rasional tentang

perlunya menambah jumlah anak sesuai dengan pekerjaan dan usaha saat ini (Sadono, 2006)

Rata – rata lama sekolah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 hingga 2022 tinggal jauh di bawah rata – rata nasional. Provinsi ini berada pada peringkat 24 secara nasional dan menempati peringkat terendah di Sumatera, setara dengan Provinsi Lampung.

Tabel 1.4

Rata – rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Periode 2017 – 2022

Wilayah Babel	Rata – rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	8.19	8.20	8.23	8.24	8.25	8.27
Belitung	8.11	8.15	8.41	8.46	8.47	8.74
Bangka Barat	7.06	7.18	7.21	7.22	7.44	7.46
Bangka Tengah	6.79	6.80	7.13	7.19	7.20	7.22
Bangka Selatan	6.12	6.36	6.42	6.67	6.71	6.89
Belitung Timur	8.00	8.14	8.15	8.22	8.47	8.67
Pangkalpinang	9.77	9.78	9.80	9.92	10.13	10.27

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2017, Kota Pangkalpinang mempunyai rata-rata lama sekolah terbanyak 9,77, sedangkan Kabupaten Bangka Selatan mempunyai rata-rata lama sekolah terkecil 6,12. Hal ini disebabkan bahwa warga Bangka Selatan tidak terlalu

tertarik untuk melanjutkan pendidikan mereka. Banyak orang lebih suka bekerja langsung dari pada kuliah. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terus berusaha dalam upaya menaikkan rata – rata lama Pendidikan masyarakat. Menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu pendekatan, namun ada beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai rata – rata lama sekolah yang tinggi.

Menurut (Azwar & Subekan, 2016) menyatakan bahwa salah satu faktor yang bisa berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan yaitu tersedianya pembangunan infrastruktur yang komprehensif dan sesuai. Mereka juga menyatakan bahwa sangat penting untuk melakukan pemeriksaan awal tentang penyebab kemiskinan di wilayah tersebut dan melihat bagaimana pemerintah kota berpartisipasi dalam proses pengurangan kemiskinan. Kemiskinan dan kondisi perekonomian serta sistem Pendidikan mempunyai korelasi yang kuat.

Salah satu faktor yang berkontribusi dalam pengurangan biaya produksi adalah infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur juga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memeberi akses terhadap lapangan pekerjaan, sehingga akan menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purnomo, 2019). Ditambah lagi, infrastruktur juga akan mengurangi kemiskinan karena dibangun untuk mempermudah mobilitas orang, barang, dan jasa.

Tabel 1.5

Infrastruktur Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Periode 2017 – 2022

Wilayah Babel	Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan (KM)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	735	735	735	735	735	735
Belitung	629	666	666	666	666	666
Bangka Barat	702	701	701	701	701	809
Bangka Tengah	347	347	347	347	441	441

Bangka Selatan	943	634	634	634	634	634
Belitung Timur	481	481	481	481	481	752
Pangkalpinang	403	403	403	403	403	403

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, Kabupaten Bangka Barat memiliki Panjang Jalan yang luas sebesar 809 KM dan Kota Pangkalpinang memiliki Panjang Jalan yang kecil sebesar 403 KM. Sebagai area yang sedang berkembang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi masalah yang serupa dengan Provinsi lain di Indonesia, yang berarti bahwa pembangunan kurang merata di setiap daerah, terutama dalam hal pembangunan Infrastruktur jalan. Pemerintah menghadapi kendala dalam melaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia dalam APBN semua jalan nasional Pulau Bangka. Ketersediaan SDM dan peralatan yang terbatas juga mempengaruhi bagaimana pemerintah melakukan pekerjaan pemeliharaan. Oleh karena itu untuk mengelola infrastruktur jaringan secara efektif, pemerintah perlu memiliki rencana dan kebijakan yang solid, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai pengawas keuangan, pemerintah harus menetapkan prioritas penanganan jalan yang tepat. Ini diperlukan agar jaringan jalan berfungsi dengan baik dan meningkatkan pertumbuhan wilayah.

Meningkatkan pengeluaran pemerintah yaitu salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Menurut (Sukirno, 2013) pengeluaran pemerintah atau alat anggaran pemerintah untuk mengendalikan perekonomian, merupakan komponen kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah diperlukan buat memperluas aktiva fisik, semacam infarastruktur dasar dan akomodasi umum, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Hal ini diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, antara lain Kesehatan, Pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketenangan, serta lingkungan hidup (Rosen, 2014).

Tabel 1.6

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

Periode 2017 – 2022

Wilayah	Pengeluaran Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka Babel	1085985 720523.6 2	1072744 879104.7 2	1242579 345311.3 0	1152653 865431.0 2	1172454 542649.5 6	1299818 887715.3 4
Belitung	8786395 55805.40	9366609 54749.24	1097846 810135.5 7	1032032 453295.4 3	9952461 73234.00	1073757 049247.8 3
Bangka Barat	8029935 44721.81	8200489 19889.74	8952559 33704.49	9161674 01428.94	8767759 08193.00	8731020 56613.69
Bangka Tengah	7722547 23298.98	8695749 85819.82	9062923 86410.40	9084673 96988.03	8725712 65093.19	8971128 19106.00
Bangka Selatan	7898838 85112.20	8951838 02836.63	9332863 37846.00	7910892 95192.00	8119796 90371.00	9321430 94492.20
Belitung Timur	7106613 61410.18	8157055 31387.94	8658893 82198.07	7742720 54766.96	8399991 51457.93	8758490 73729.11
Pangkalpinang	8168197 90495.26	8835444 27973.98	9547274 23814.72	8875599 06542.61	9031073 95502.70	9826883 83730.00

Sumber : DJPK, APBD

Pada 6 tahun terakhir pengeluaran pemerintah Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan dan penurunan, namun jika dilihat dari Kabupaten atau Kota Kabupaten Bangka Barat memiliki pengeluaran pemerintah yang paling rendah dan yang paling tertinggi terdapat di Kabupaten Bangka jika dilihat pada tahun 2022.

Mengingat konteks diatas, peneliti terkesan untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Infrastruktur dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga bisa diidentifikasi permasalahan bagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022?
3. Bagaimana pengaruh Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022?
4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tentang hal ini tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Selanjutnya yaitu jumlah keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Bisa menaikkan kesadaran akan akibat PDRB, Pendidikan, Infrastruktur, dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap tingkat kemiskinan.

2. Manfaat Praktisi

Dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk dijadikan landasan bagi program – program yang bertujuan menurunkan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penelitian ini Sistematika penulisan dipecahkan menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab I pada penelitian ini membahas tentang latar belakang masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab II pada penelitian ini membahas kajian pustaka terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian dan landasan teori semua variabel baik variabel terikat maupun bebas.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab III pada penelitian ini membahas tentang jenis dan sumber data, pengertian operasional variabel, metode analisis, pemilihan model terbaik dan uji statistik.

BAB IV: Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab IV pada penelitian ini membahas tentang deskripsi data penelitian, estimasi regresi data panel, pemilihan model, evaluasi hasil regresi data panel metode fixed effect, pengujian hipotesis, pembahasan hasil pada penelitian serta analisis intersep.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab V pada penelitian ini membahas tentang kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini dan saran yang diberikan yang diharapkan dapat berguna bagi akademik penelitian selanjutnya maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

KAJIAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Sukmawijaya (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2015”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi hubungan antara tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur dengan rata-rata lama sekolah, angka melek hidup, angka harapan hidup, dan jumlah puskesmas. Data panel digunakan sebagai metode. Berdasarkan hasil analisis, angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan variabel rata-rata lama sekolah, angka melek hidup, dan jumlah puskesmas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di provinsi tersebut.

Woyanti (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah (2011 – 2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 hingga 2015. Data panel digunakan sebagai metode. Berdasarkan temuan analisis, tingkat kemiskinan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pertumbuhan PDRB. Tingkat kemiskinan dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Sebaliknya, terdapat korelasi yang penting dan positif antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Nengah and Made (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabuapten/Kota di Provinsi Bali”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel belanja pemerintah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab terhadap penurunan angka kemiskinan. Metode analisis jalur digunakan. Analisis ini menunjukkan bahwa investasi dan belanja pemerintah secara langsung dan signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan secara langsung dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi

mempunyai dampak langsung yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan investasi mempunyai dampak positif namun tidak signifikan secara statistik. Pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pengeluaran pemerintah dan investasi.

Shiffa and Raja (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Listrik, Sekolah, Dan PDRB Terhadap kemiskinan Di Aceh”. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji bagaimana infrastruktur di Aceh jalan, listrik, sekolah, dan PDRB mempengaruhi kemiskinan. Data panel digunakan sebagai metode. Koefisien regresi yang diperoleh dari analisis ini menunjukkan bahwa variabel infrastruktur jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Aceh, variabel listrik tidak berpengaruh, variabel sekolah berpengaruh negatif dan signifikan, dan variabel PDRB tidak berpengaruh.

Amala (2022) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB, Buta Huruf, Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri, Panjang Jalan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015- 2019”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana panjang jalan, PDRB, buta huruf, dan investasi asing dan domestik mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Regresi data panel merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh faktor investasi dalam negeri dan luar negeri.

Pitriyani et al (2022) melakukan penelitian dengan judul “Infrastruktur dan Kemiskinan : Studi Empiris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh variabel industri, kesehatan, pendidikan, panjang jalan, pariwisata, dan kuantitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Regresi data panel merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan industri, kesehatan, dan pariwisata secara signifikan memperburuk kemiskinan. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah tidak banyak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pendidikan mempunyai dampak positif yang cukup besar.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan didefinisikan dimana ketidakmampuan individu untuk melengkapi keinginan mendasar dalam semua aspek kehidupannya. Kemiskinan dipahami secara umum sebagai keadaan di mana seseorang memiliki sedikit uang, tingkat pendapatan yang rendah, dan tidak memenuhi kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sejumlah faktor yang saling berhubungan, termasuk lokasi, geografi, gender, tingkat pendapatan, Pendidikan, dan akses terhadap produk dan layanan, semuanya berdampak pada kemiskinan yang merupakan permasalahan yang rumit (Renggapratiwi, 2009).

Menurut Chambers dalam (Suryawati, 2005), kemiskinan merupakan suatu pengertian terpadu yang mencakup lima ciri dalam arti luas : 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan terhadap keadaan darurat (*state of emergency*), 4) bergantung (*dependence*), 5) keterasingan (*isolation*) baik menurut sosiologis atau geografis. Hidup dalam kemiskinan tidak hanya mencakup sedikit atau tidak punya uang, hal ini juga mencakup kondisi Kesehatan dan Pendidikan yang buruk, perlakuan tidak adil oleh hukum, rentan terhadap ancaman pelanggaran hukum, dan ketidakmampuan mengambil keputusan sendiri (Suryawati, 2005).

Ada empat jenis kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan absolut : Apabila penghasilan seseorang berada di bawah garis kemiskinan maupun tidak memadai untuk melengkapi keinginan dasar mereka akan perumahan, pangan, sandang, layanan Kesehatan, dan Pendidikan guna mempertahankan cara hidup dan pekerjaan mereka.
2. Kemiskinan relatif : Karena program pembangunan belum menjangkau semua orang, maka terjadilah ketimpangan pendapatan yang merupakan kondisi kemiskinan.
3. Kemiskinan kultural : Menggambarkan masalah – masalah dengan sikap sosial atau individu yang disebabkan oleh pengaruh budaya seperti kurangnya keinginan untuk mencoba meningkatkan taraf hidup, kemalasan, pemborosan, dan kurangnya kreativitas bahkan dalam menghadapi bantuan dari luar.

4. Kemiskinan struktural : Keadaan kemiskinan yang dipengaruhi oleh ketidaktersedian sumber daya dalam kerangka sosial politik dan budaya yang tidak hanya mendesak pengentasan kemiskinan namun ada kalanya justru membuat semakin berkembang biak.

Selain itu, ada dua kategori kemiskinan:

1. Kemiskinan alamiah : Terkait kesulitan sumber daya alam dan infrastruktur publik, juga kondisi lahan kosong.
2. Kemiskinan buatan : Hal ini disebabkan oleh modernisasi atau system pembangunan yang menyebabkan penduduk kesusahaan dalam mengelola secara adil sumber daya, infrastruktur, dan sumber daya ekonomi yang sudah ada.

Menurut (Hadiyanti, 2006) kemiskinan adalah konsekuensi dari ketidakmerataan dalam pendistribusian hasil pembangunan serta sikap mental orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Karena faktor budaya dan alam, hal ini biasanya diamati dari pendapatan rendah, Pendidikan rendah, produktivitas rendah, kualitas hidup rendah, modal rendah, keterampilan rendah, teknologi rendah, dan kondisi sosial lainnya. Kemiskinan didefinisi sebagai “ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum” menurut (Kuncoro, 2003).

Kemiskinan didefinisikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mempunyai hak – hak dasar yang diperlukan untuk tumbuh dan menjalani kehidupan yang bermartabat.

Menurut Badan Pusat Statistik indikator kemiskinan yaitu perhitungan garis kemiskinan untuk warga yang berpendapatan kurang dari Rp 7.057 per orang per hari. Perhitungan hari kemiskinan yang memperhitungkan permintaan pangan dan non makanan menghasilkan tingkat kemiskinan. Diperkirakan setiap orang membutuhkan sekitar 2.100 kilo kalori perhari dari 52 jenis komoditas berbeda, yang diperkirakan mencerminkan pola konsumsi masyarakat lapisan bawah dan konsumsi non makanan dari 45 jenis makanan berbeda, menurut data nasional. Setiap kelompok umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, berat badan, dan keadaan fisiologis tercakup dalam standar kecukupan kalori 2.100. Karena ini

adalah garis kemiskinan maka setiap orang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan tersebut dianggap miskin. Sementara, biaya pendidikan rumah dan kesehatan adalah contoh kebutuhan minimum lainnya. Menurut Bank Dunia kemiskinan adalah keadaan yang menghalangi hidup yang baik untuk mendapatkan USD 1,00 per hari.

Kemiskinan mempunyai tiga akar penyebab menurut Sharp dalam (Kuncoro, 2006). Pertama, ketimpangan distribusi pendapatan diakibatkan oleh ketimpangan pola kepemilikan sumber daya, yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan. Kedua, sumber daya di lingkungan masyarakat berpendapatan rendah langka dan berkualitas buruk. Kemiskinan diperparah dengan kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Gaji berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang berujung pada rendahnya produktivitas. Salah satu kemungkinan penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah kurangnya pengetahuan, yang dapat menjadi akibat buruk dari deskriminasi. Ketiga, kemiskinan disebabkan oleh kesenjangan akses terhadap modal.

Salah satu masalah yang mempengaruhi perekonomian adalah kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang. Permasalahan kemiskinan sangatlah rumit dan memiliki banyak aspek. Kemiskinan dalam hal asset, pengetahuan, keterampilan, organisasi sosial politik dan asset sekunder seperti sumber daya keuangan, informasi, dan jaringan sosial, hanyalah beberapa dari banyak aspek kemiskinan. Kemiskinan juga bersifat berbelit – belit, artinya kemiskinan memiliki sejarah yang cukup panjang dan rumit serta tidak selalu muncul dengan segera, sehingga sulit untuk mengidentifikasi penyebab dari kemiskinan. Ciri – ciri kemiskinan mencakup makanan yang tidak memadai, kurangnya akses terhadap air tingkat pendidikan yang buruk, perumahan yang buruk, dan layanan kesehatan yang buruk.

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jumlah yang diperoleh dalam suatu negara, termasuk keuntungan dari faktor – faktor produksi luar negeri, Nilai pasar seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam perekonomian selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun, disebut sebagai produk domestik regional bruto (PDRB), yaitu jumlah total yang

dibelanjakan untuk barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri (G. N. Mankiw, 2013). Data PDRB adalah alat yang berharga untuk menilai status ekonomi suatu wilayah selama periode waktu tertentu, karena data tersebut dapat digunakan dengan harga konstan dan harga berlaku. Saat membandingkan PDRB berdasarkan harga saat ini dengan PDRB berdasarkan harga konstan, PDRB berdasarkan harga konstan menggambarkan nilai tambah produk dan layanan yang dievaluasi setiap tahun menggunakan harga, sedangkan PDRB berdasarkan harga pada tahun dasar perhitungan tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan suatu daerah dapat ditentukan dengan menggunakan salah satu dari tiga cara berikut:

1. PDRB menurut pendekatan produksi

Nilai total barang atau jasa jadi menyebabkan terjadinya varians pada fasilitas manufaktur dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit – unit tersebut terbagi dalam Sembilan bidang usaha dalam penyajiannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkebunan, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
- b. Pengalihan & pertambangan
- c. Sektor pengelolaan
- d. Air bersih, gas, & listrik
- e. Bangunan
- f. Hotel, perdagangan, & restoran
- g. Komunikasi & pengangkutan
- h. Jasa perusahaan, persewaan, & keuangan
- i. Jasa - Jasa

2. PDRB menurut pendekatan pendapatan

Kompensasi ini dimanfaatkan oleh unsur – unsur produksi yang menjadi bagian dari proses pembuatan di suatu lokasi tertentu dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Gaji dan upah, bunga modal, laba, dan sewa tanah merupakan pembayaran atas jasa produksi yang bersangkutan sebelum pajak penghasilan dan pajak langsung dikurangi.

3. PDRB menurut pendekatan pengeluaran

Mewakili total pengeluaran akhir, yang mencakup pengeluaran rumah tangga, dunia usaha, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba swasta selama jangka waktu tertentu (satu tahun), serta penciptaan modal tetap bruto, pergerakan stok, dan ekspor neto. Ekspor dikurangi impor sama dengan ekspor neto. Ekspor yang dimaksud antara lain hanya keluar daerah, baik darat, laut, maupun udara, selain hanya keluar negeri. Begitu juga impor kebalikannya.

Ada dua komponen yang perlu diketahui jika membahas tentang pertumbuhan ekonomi, produksi total (PDB) dan jumlah penduduk. Produksi ekonomi keseluruhan dibagi jumlah penduduk adalah produktivitas per orang (Boediono, 2013).

Keberhasilan suatu negara dapat dievaluasi melalui metode berikut untuk mengukur pertumbuhan ekonomi:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto (PDB), atau produk regional bruto (PDRB) di tingkat regional, adalah total nilai pasar dari produk akhir dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian pada tahun tertentu. Meskipun kesejahteraan seharusnya benar – benar dirasakan oleh masyarakat lokal, PDB dan PDRB merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi yang tepat karena tidak menggambarkan keadaan masyarakat yang sebenarnya.

2. Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita atau Pendekatan Perkapita

PDB perkapita versi nasional (juga dikenal dengan PDRB per kapita) merupakan sarana pengukur ekonomi yang berguna karena lebih akurat dan bisa mewakili kesejahteraan masyarakat di wilayah atau negara tertentu. PDB suatu wilayah menggambarkan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah total nilai yang diciptakan disuatu daerah dikalikan dengan harga pasar pada saat tertentu dapat dianggap sebagai peningkatan pendapatan per kapita, yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun, angka ini harus dinyatakan secara riil atau berdasarkan harga konstan agar bermakna sepanjang waktu.

Nilai produk domestik bruto (PDRB) yang sering disebut pendapatan per kapita dihitung dengan membagi produk nasional bruto (PDB) tahunan dengan jumlah barang yang diproduksi. Sehingga salah satu rumus ini dapat digunakan untuk

memahami pendapatan per kapita suatu negara (Sadono Sukirno, 1978). PDB perkapita adalah statistik penting untuk mengukur Kesehatan ekonomi suatu wilayah. Pendapatan perkapita menunjukkan kapasitas masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa, dan peningkatan pemungutan pajak dibantu oleh peningkatan pendapatan nasional rata – rata per orang.

Pertumbuhan PDRB di suatu wilayah akan menunjukkan seberapa jauh kemajuan perekonomian di daerah tersebut maka akan menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat dalam satu periode sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Semakin tinggi tingkat PDRB dan lebih banyak orang miskin yang memperoleh manfaat dari PDRB akan berdampak positif pada masyarakat, artinya semakin tinggi kesejahteraan dan semakin rendah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

2.2.3 Pendidikan

Tujuan pendidikan adalah untuk memberikan suasana dan proses yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan kualitas kecerdasan, pengendalian diri, kekuatan spiritual, kepribadian dan moralitas tinggi yang diperlukannya untuk hidup dalam masyarakat, negara dan dunia. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengacu pada sistem pendidikan.

(Tadoro P. Michael, 2015) berpendapat bahwa semua upaya pembangunan harus memprioritaskan pendidikan penduduk, karena kemampuan suatu bangsa dalam menyerap teknologi baru, menciptakan kesejahteraan dan mendorong pembangunan berkelanjutan bergantung pada tingkat pendidikannya. Indikator pendidikan adalah rata-rata lama bersekolah. Rata-rata lama sekolah menunjukkan tingkat pendidikan formal yang dipegang oleh anggota suatu masyarakat. Standar pembelajaran yang lebih tinggi dicapai dengan semakin lamanya hari sekolah. “Tahun bersekolah” mengacu pada jumlah rata-rata tahun yang dihabiskan anak usia 15 tahun di sekolah pada semua tingkat pendidikan formal. Melalui perpanjangan program wajib belajar menjadi 9 tahun atau dari SD hingga SMP. Pemerintah berupaya menaikkan rata – rata lama sekolah.

Secara umum ada tiga kategori Pendidikan yang dapat ditempu seseorang:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai program pendidikan yang dibagi menjadi tiga jenjang dasar, menengah, dan menengah atas. Pendidikan dalam arti formal adalah yang diorganisir secara sistematis, memiliki jenjang atau tingkatan yang berlangsung selama periode waktu tertentu, mulai dari sekolah dasar hingga universitas. Pendidikan formal mencakup program Pendidikan umum dan program khusus serta Lembaga yang digunakan untuk berbagai macam pelatihan teknis dan professional.

2. Pendidikan Non-Formal

Pendidikan nonformal dapat mengarah pada pendidikan nonformal yang dapat diselenggarakan secara bertahap dan terencana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan non-formal (Marzuki, 2012) berpendapat bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar sistem sekolah atau Pendidikan formal terstruktur disebut dengan Pendidikan non formal. Pendidikan non formal diselenggarakan secara mandiri dan berperan penting dalam program yang lebih luas untuk memenuhi tujuan pembelajaran tertentu bagi peserta didik. Menurut Axin (Suprijanto, 2009) Pendidikan non-formal merupakan aktivitas belajar dan pembelajaran yang disengaja berjalan di luar sistem sekolah.

3. Pendidikan Informal

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan lingkungan hidup keluarga dan formal dapat dihasilkan dari pembelajaran mandiri melalui pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan suatu bentuk pengajaran yang diberikan oleh lingkungan dan keluarga melalui kegiatan belajar mandiri yang dilaksanakan secara penuh tanggung jawab dan penuh kesadaran. Setelah lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan, hasil pendidikan formal dan nonformal diakui sama.

2.2.4 Infrastruktur

Infrastruktur jalan adalah bagian penting dari infrastruktur yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Jalan – jalan ini memungkinkan modal perusahaan difokuskan dan membuat distribusi barang menjadi lebih efisien. Infrastruktur suatu negara dapat secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi asing, dan memudahkan perdagangan dalam

negeri, berdasarkan berbagai pendekatan teoritis dan empiris dari berbagai penelitian. Dengan asumsi model perekonomian transportasi tradisional, banyak asumsi yang tidak dapat diperiksa atau dibuktikan. Misalnya, model analisis perekonomian *ex ante* dan prediksi biasanya memberi gambaran situasi dimana proyek pembangunan jalan dapat mempercepat perjalanan, menghemat waktu, dan mengurangi biaya transportasi. Dalam analisis modal perekonomian, perbandingan hasil kerja dilakukan sebelum atau sesudah pembangunan. Analisis ini mengatakan bahwa pertumbuhan atau dampak hanya disebabkan oleh pembangunan jalan, tanpa memperhatikan kontribusi dari sektor lain. Ini berarti bahwa pembangunan tidak melihat secara langsung bagaimana penggunaan jalan dan perubahan tingkah laku terjadi, sehingga sangat penting untuk memahami tentang hal ini untuk meningkatkan efisien investasi dalam transportasi jalan (Abdika, 2021)

2.2.5 Pengeluaran Pemerintah

Kebijakan fiskal mencakup pengeluaran pemerintah yang merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal (Sukirno, 2004). Angka pendapatan dan belanja tahunan ditetapkan oleh pemerintah dan ditampilkan dalam laporan APBN nasional dan APBD daerah. Keynes berpendapat bahwa salah satu elemen permintaan agregat adalah pengeluaran pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, hitung pendapatan nasional sebagai berikut $Y = C + I + G + X - M$. Variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat, dan variabel Y menunjukkan pendapatan nasional dan juga penawaran agregat. Dengan membandingkan nilai G dan Y dapat menentukan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional dan melacak variasinya dari waktu ke waktu (Dumairy, 1996). Ada dua jenis teori tentang pengeluaran pemerintah yaitu teori makro dan teori mikro (Mangkoesobroto, 2002).

Teori ekonomi makro mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah ke dalam tiga kategori utama (Boediono, 1998) :

- a. Pengeluaran pemerintah untuk perolehan barang dan jasa
- b. Pengeluaran pemerintah pada kompensasi karyawan
- c. Pembayaran transfer dibayar oleh pemerintah. Pembayaran transfer adalah pembayaran langsung yang dilakukan oleh pemerintah kepada

warga negaranya itu bukanlah pembelian barang atau jasa di pasar bebas. Contoh pembayaran transfer antara lain pembayaran pensiun, pembayaran bunga pinjaman pemerintah, dan pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada organisasi masyarakat tertentu. Sekalipun terdapat perbedaan administratif, pembayaran transfer dan posisi gaji pegawai mempunyai status dan dampak ekonomi yang sama.

Sebaliknya, barang publik dirancang untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi penawaran dan permintaan barang publik pada tingkat mikro. Kaitan antara ketersediaan dan permintaan menentukan berapa banyak barang publik yang disediakan melalui anggaran. Jumlah barang publik yang ditawarkan akan menentukan seberapa besar permintaan barang publik lainnya (Basri, A. F. M., 2005).

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan

Mempertahankan kemajuan ekonomi dan meningkatkan kekayaan memerlukan pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan. Kemiskinan akan meningkat sebagai respons terhadap ekspansi ekonomi jika tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan pekerjaan (*ceteris paribus*) (Tambunan, 2003).

Menurut Sadono Sukirno (2000), tanpa memperhitungkan peningkatan yang lebih besar atau lebih kecil, pertumbuhan PDRB menunjukkan laju ekspansi ekonomi. Selain itu distribusi uang ke seluruh masyarakat dan penerimaan manfaat harus diperhitungkan ketika mengukur pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, konsumsi rumah tangga dan kualitas hidup akan terkena dampak Ketika PDRB suatu daerah menurun. Selain itu, karena sempitnya jangkauan ekonomi penduduk, banyak rumah tangga miskin yang terpaksa mengubah cara hidupnya. Mirip dengan kebiasaan makan mendasar yaitu mengurangi jumlah barang yang dibeli dan beralih ke barang yang lebih murah.

Menurut Kuznet (Tulus H. Tambunan, 2001), Karena kemiskinan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan, terdapat hubungan yang kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin

secara bertahap menurun. Menurut (Kraay, 2006) menunjukkan bahwa upaya yang relevan untuk mengurangi kemiskinan akan mengalami pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang lama. Nilai ekstra yang dapat dihasilkan setiap warga negara sebagai hasil kegiatan produksi disebut PDRB per kapita per wilayah atau di singkat PDRB per kapita. (Jalles, 2011) menyatakan bahwa peningkatan kekayaan suatu wilayah secara keseluruhan sejalan dengan penurunan kemiskinan.

2.3.2 Hubungan Pendidikan Terhadap Kemiskinan

(Todaro, 1994) menyatakan bahwa Sebagian besar studi ekonomi selama beberapa tahun berfokus pada hubungan antara produktivitas pekerja, tingkat produksi, dan pencapaian pendidikan di negara maju dan berkembang. Hal ini dapat dimengerti mengingat optimalisasi pertumbuhan produksi secara keseluruhan merupakan tujuan utama pembangunan pada tahun 1950an dan 1960an. Akibatnya, pendidikan berdampak pada distribusi pendanaan dan upaya untuk memerangi kemiskinan absolut sebagian besar telah dilupakan.

Menurut Simmons (dikutip dari Todaro, 1994) salah satu strategi untuk keluar dari kemiskinan di banyak negara adalah pendidikan. Seseorang yang miskin harus memiliki peningkatan pencapaian Pendidikan jika mereka mengharapkan kerjaan yang baik dan berpenghasilan yang tinggi. Namun, orang kaya mampu mendapatkan pendidikan tinggi, sedangkan mereka yang sedang dalam keadaan miskin tidak memiliki dana untuk menutupi biaya pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, semacam universitas dan sekolah lanjutan. Karena itu, pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menangani masalah kemiskinan.

2.3.3 Hubungan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan

Pembangunan jalan akan membuka lapangan kerja baru, yang akan mempengaruhi sumber penerimaan masyarakat yang beragam. Pembangunan jalan juga akan membuat masyarakat lebih efisien dalam hal waktu dan biaya atau mungkin masyarakat memperluas usaha, pembangunan bangunan permanen, air, listrik (Abdika, 2021).

2.3.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Perlunya intervensi pemerintah dikarenakan masalah pembangunan yang terjadi. Diharapkan masalah kemiskinan dapat diselesaikan dengan intervensi ini.

Intervensi yang dimaksud oleh pemerintah adalah pengeluaran pemerintah, selain pajak merupakan salah satu alat kebijakan fiskal. Tujuan anggaran yang ingin dicapai pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan pengeluaran. Tujuan ekonomi tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pencegahan inflasi, dan percepatan pembangunan ekonomi jangka panjang. Pengeluaran eksogen seperti yang dilakukan pemerintah ditentukan oleh keseluruhan anggaran yang dibiayai oleh pajak. Oleh karena itu, tujuan pengeluaran pemerintah adalah untuk membangun infrastruktur gedung publik serta bantuan langsung dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan mencapai kesetaraan pendapatan. Hal ini menunjukkan bagaimana alat kebijakan fiskal, seperti pengeluaran pemerintah, diharapkan dapat berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, yang akan menurunkan pengangguran, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang semuanya akan menurunkan kemiskinan.

2.4 Formulasi Hipotesis

Pemecahan atau kesimpulan suatu topik penelitian yang harus diuji secara empiris disebut hipotesis. Berikut hipotesis yang akan diajukan:

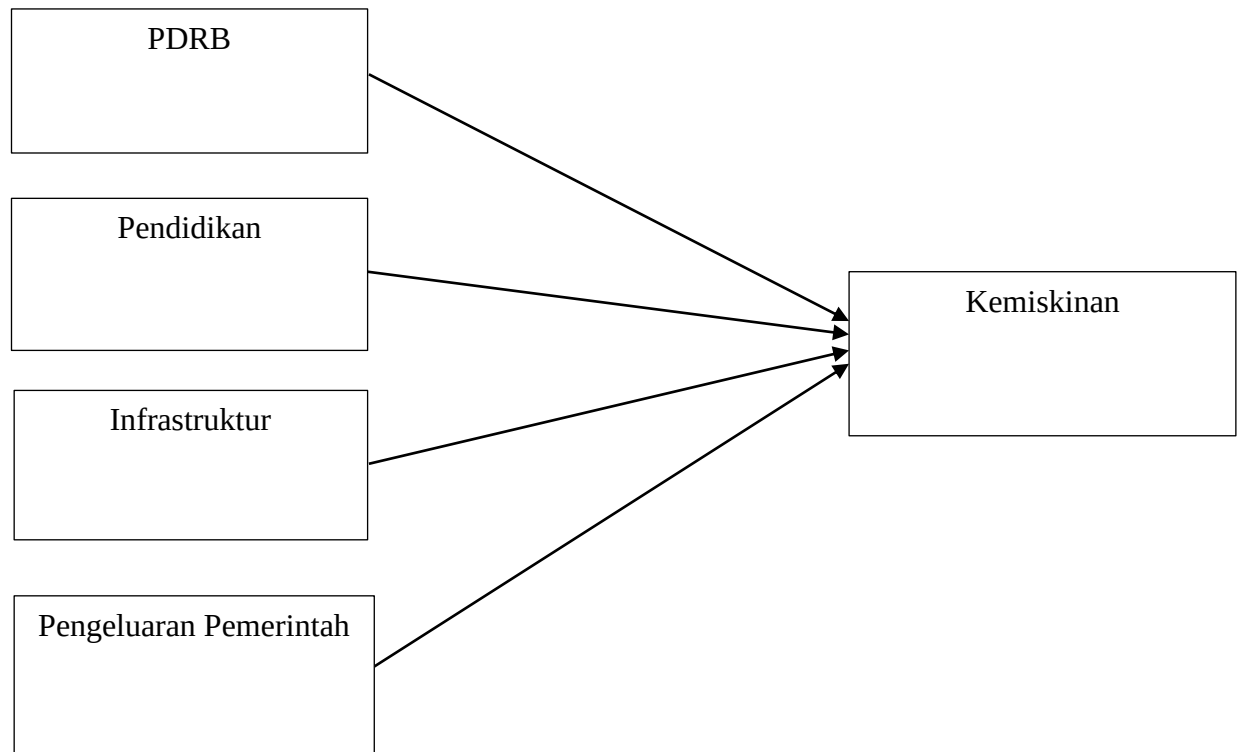
1. PDRB berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Infrastruktur berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.5 Kerangka Pikiran

Penulis di sini akan memberikan penjelasan tentang model kajian yang digunakan sebagai titik awal. Kemudian mereka akan menggunakan alur pemikiran untuk menganalisis komponen – komponen yang berkontribusi terhadap tingkat

kemiskinan masyarakat. Gambar 2.1 menunjukkan rincian lebih lanjut tentang representasi grafis studi.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan sumber pengumpulan data

Penelitian ini memakai data kuantitatif, sumber yang didapatkan dari informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data panel yang menggabungkan data cross-sectional dari enam kabupaten dan satu kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan data time series tahun 2017–2022. Tujuan penelitian ini yaitu buat melihat bagaimana kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh variabel independen PDRB, Pendidikan, Infrastruktur, Pengeluaran Pemerintah.

3.2 Definisi variabel operasional

Variabel dependen dan variabel independen merupakan variabel yang dipakai selama penelitian ini, masing-masing singkatan dari definisi atau gagasan operasional yang dapat dikuantifikasi menggunakan nilai-nilai berbeda untuk memberikan gambaran yang lebih tepat tentang subjek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, kemiskinan (Y) adalah variabel dependen atau terikat yang akan dipakai. Sedangkan variabel independent nya PDRB (X1), Pendidikan (X2), Infrastruktur (X3) dan Pengeluaran Pemerintah (X4) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan untuk suatu kondisi dimana individu mempunyai sedikit uang dan rendahnya tingkat pendapatan serta ketidakmampuan memenuhi standar kebutuhan dasar atau kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Variabel dependen ini menampilkan derajat kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data untuk penelitian tahun 2017–2022 dengan menggunakan satuan jumlah jiwa.

3.2.2 PDRB

PDRB adalah total yang diterima di dalam negeri, termasuk keuntungan dari faktor produksi luar negeri, nilai pasar dari semua barang dan jasa jadi yang

dihasilkan dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu sering kali dalam satu tahun, atau jumlah total yang dibelanjakan untuk produk dan jasa yang dibuat di dalam negeri (N. G. Mankiw, 2013). Studi ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan sebagai datanya dan mengkaji bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyajikan data penelitian ini pada satuan jutaan rupiah tahun 2017–2022.

3.2.3 Pendidikan

Hakikat pendidikan adalah menciptakan suasana dan proses pembelajaran dimana peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki agama, pengendalian diri, individualitas, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan baik bagi dirinya maupun masyarakat. Ini adalah upaya yang terarah dan terorganisir. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyajikan data penelitian dengan satuan tahunan pada tahun 2017–2022.

3.2.4 Infrastruktur

Infrastruktur jalan merupakan komponen penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di lokasi padat penduduk tetapi juga di tempat terpencil atau pedesaan, pembangunan ekonomi dapat digerakkan oleh infrastruktur jalan. Banyak orang bisa mendapatkan pekerjaan atas pembangunan infrastruktur. Infrastruktur jalan dapat dianggap sebagai aset fisik karena merupakan komponen penting dalam proses produksi. Dengan demikian, peningkatan output akan menunjukkan peningkatan pendapatan dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan data penelitian dengan memakai satuan KM tahun 2017–2022.

3.2.5 Pengeluaran Pemerintah

Keputusan yang diambil pemerintah dalam menawarkan jasa dan barang publik terhadap penduduk termasuk dalam kategori produk yang disebut pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal mencakup pengeluaran pemerintah, ini adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dengan menghitung berapa banyak uang yang dibelanjakan dan berapa banyak yang dihasilkannya,

informasi tersebut ditampilkan dalam dokumen APBN nasional maupun dokumen APBD daerah atau wilayah (Sukirno, 2005). Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017–2022 dalam penelitian ini, memakai satuan jutaan rupiah.

3.3 Metode analisis

Untuk melakukan observasi ini, penulis memakai regresi kuantitatif data panel. Data yang digunakan berupa *time series* dan *cross-section*. Menurut (Widarjono, 2018) diperoleh dua manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan data panel jika disamakan dengan menggunakan data *cross section* maupun *time series* saja. Pertama, penggunaan data bisa mengasihkan akses pada jumlah data yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menghasilkan lebih besar *degree of freedom*. Kedua, data panel informasi dari dua sumber data *time series* dan data *cross-section* bisa membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul akibat penghapusan variabel.

Dalam pengelolaan data kuantitatif, penulis pertama – tama menyusun data panel menggunakan Microsoft Excel, yang kemudian diolah menggunakan EvIEWS 12. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana variabel dependen Jumlah Penduduk Miskin (Y) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 dipengaruhi oleh variabel independen PDRB (X1), Pendidikan (X2), Infrastruktur (X3), dan Pengeluaran Pemerintah (X4).

Ada berbagai metode buat memprediksi regresi data panel, antara lain metode *common effect*, metode *fixed effect*, dan metode *random effect*. Masing-masing metode yang dipakai dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 *Common Effect Model* (CEM)

Common effect model yang menggabungkan data *time series* dengan data *cross section* tanpa mempertimbangkan ruang lingkup variasi antar waktu atau antar individu merupakan salah satu model estimasi data panel paling dasar. Artinya, data *cross section* berperilaku konsisten sepanjang waktu. Untuk model ini persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Dimana :

Y : Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Konstanta regresi

X_{1it} : PDRB (Juta Rupiah)

X_{2it} : Pendidikan (Tahun)

X_{3it} : Infrastruktur (KM)

X_{4it} : Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)

i : Kota / Kabupaten

t : Tahun

e_{it} : Error

3.3.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Model fixed effect, yang bisa disebut sebagai teknik Least Dummy Variables (LSDV), menganggap ada perbedaan intercept di dalam persamaan sedangkan slopenya tetap. Dengan menggunakan variabel dummy, model ini diestiamsi variabel dummy k-1 diperlukan. Model regresi fixed effect memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_6 D_6 + e_{it}$$

Keterangan :

Y : Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Konstanta regresi

X_{1it} : PDRB (Juta Rupiah)

X_{2it} : Pendidikan (Tahun)

X_{3it} : Infrastruktur (KM)

X_{4it} : Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)

D : Dummy kabupaten di provinsi Kepulauan Bangka Belitung

α : Tingkat Signifikan

i : Kota / Kabupaten

t : Tahun

e_{it} : Error

3.3.3 *Random Effect Model (REM)*

Ketika muncul masalah atau gangguan yang mungkin berhubungan, seperti individu dan waktu, model efek random adalah teknik estimasi data panel. Selain itu, teknik ini dipakai untuk mengurangi konsekuensi derajat kebebasan, yang dapat mengurangi efisiensi parameter. Berikut persamaan model efek random:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_6 D_6 + \varepsilon_i + e_{it}$$

Keterangan :

Y : Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Konstanta regresi

X_{1it} : PDRB (Juta Rupiah)

X_{2it} : Pendidikan (Tahun)

X_{3it} : Infrastruktur (KM)

X_{4it} : Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)

D : Dummy kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ε : Epsilon

α : Tingkat Signifikan

i : Kota / Kabupaten

t : Tahun

e_{it} : Error

3.4 Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel

Common effect model, *fixed effect model*, dan *random effect model* merupakan tiga cara yang dapat digunakan untuk analisis regresi data panel. Tujuan dari ketiga cara ini adalah buat mengidentifikasi cara yang paling benar untuk menjelaskan korelasi antar variabel independen dan dependen saat penelitian ini. Regresi data panel diuji dengan dua langkah untuk mengidentifikasi cara yang tepat untuk penelitian ini. Pertama, *model fixed effect* dan *model common effect* dibandingkan menggunakan uji Chow membuktikan mana yang lebih benar. Uji Hausman kemudian dipakai untuk membandingkan *model fixed effect* terhadap *model random*

effect. Tujuannya adalah buat memutuskan cara mana yang paling baik buat menjawab masalah penelitian ini.

3.4.1 Uji Chow

Untuk melakukan estimasi data panel, uji Chow dipakai buat mengestiamsi cara yang terpilih antara *model fixed effect* dan *model common effect*. Hipotesis berikut diuji buat pengujian ini:

H_0 = *Common Effect Model* lebih baik dari Effect Model

H_1 = *Fixed Effect Model* lebih baik dari Effect Model

Gunakan uji F atau Chi-Square untuk memastikan apakah probabilitasnya lebih kecil atau lebih besar dari alpha (0,01) untuk memilih model yang baik. *Model coomon effect* digunakan jika H_0 gagal menolak, probabilitasnya lebih tinggi dari alpha (0,01). *Model fixed effect* digunakan jika H_0 menolak, probabilitasnya kurang dari alpha (0,01).

3.4.2 Uji LM

Model optimal antara model random effect dan model common effect diestimasi menggunakan uji Lagrange Multiplier pada saat mengestimasi data panel. Hipotesis berikut diuji untuk pengujian ini:

H_0 = *Common Effect Model* lebih baik dari Effect Random Model

H_1 = *Random Effect Model* lebih baik dari Effect Common Model

Gunakan Breusch-Pangan untuk memastikan apakah probabilitasnya lebih kecil atau lebih besar dari alpha (0,01) untuk memilih model yang baik. *Model coomon effect* digunakan jika H_0 gagal menolak, probabilitasnya lebih tinggi dari alpha (0,01). *Model random effect* digunakan jika H_0 menolak, probabilitasnya kurang dari alpha (0,01).

3.4.3 Uji Hausman

Uji hausman adalah uji statistik yang dipakai buat menentukan *model fixed effect* atau *model random effect* yang lebih baik. Hipotesis diuji dalam pengujian ini:

H_0 = Random Effect Model lebih baik dari Effect Fixed Model

H_1 = Fixed Effect Model lebih baik dari Effect Random Model

Untuk menentukan model yang baik lakukan Chi-Square atau Cross Section untuk mengetahui apakah probabilitasnya lebih besar atau lebih kecil dari alpha (0,01). Jika probabilitasnya lebih besar dari alpha (0,01) sehingga gagal menolak H_0 dan model yang dipakai adalah *random effect model*. Jika probabilitasnya lebih kecil dari alpha (0,01) maka menolak H_0 dan model yang dipakai adalah *fixed effect model*.

3.4 Pengujian Statistik

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui perhitungan regresi yang dilakukan dengan menggunakan uji f-statistik, uji t-statistik, dan koefisien determinasi (R²), sebagai berikut:

3.5.1 Koefisien Determinasi

Gunakan uji R-Squared untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Jika nilai R-Squared lebih besar, maka hubungan antara variabel independen dan dependen akan semakin kuat.

3.5.2 Uji F-Statistik (Uji Kelayakan Model)

selama membandingkan koefisien regresi, variabel independent diuji baik secara individual maupun dalam kombinasi dengan satu sama lain dengan menggunakan uji f-statistik. Untuk perbandingan ini, hipotesis nolnya adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, secara bersamaan tidak mempunyai hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, secara bersamaan tidak terdapat hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen.

Jika nilai probabilitas lebih besar dari alpha maka menolak H_0 dan menerima H_a , artinya secara bersamaan variabel independent tidak memiliki hubungan signifikan terhadap variabel dependen, begitu juga kebalikannya kalau probabilitasnya lebih kecil dari alpha maka menerima H_0 dan menolak H_a , yang berarti secara bersamaan variabel independent memiliki hubungan signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.3 Uji t-statistik (Uji Parsial)

Uji t-statistik dipakai buat melihat seberapa kuat hubungan variabel independent dengan variabel dependen. Untuk tes ini terdapat beberapa pilihan keputusan yaitu:

1. $H_0 : \beta_i = 0$, dan kata lain, variabel dependen tidak berpengaruh dengan variabel independent sendiri.
2. $H_a : \beta_i < 0$, dengan kata lain, variabel independen memiliki dampak negatif terhadap variabel dependen sebagai individual.
3. $H_a : \beta_i > 0$, dengan kata lain, variabel independen berdampak positif terhadap variabel dependen secara individual.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Metode regresi data panel digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menggabungkan data time series tahun 2017 hingga tahun 2022 dengan data cross-section dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Total 42 data dari penelitian ini yang dianalisis dan digunakan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen PDRB, Pendidikan, Infrastruktur, dan Pengeluaran Pemerintah mempunyai dampak terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan diproses dengan aplikasi E-views 12 dan metode analisis regresi data panel.

Statistik deskriptif adalah analisis statistik yang menggunakan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum untuk memberikan gambaran tentang karakteristik variabel penelitian. Nilai total data dibagi dengan jumlah data yang ada adalah mean, dan standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari perbedaan nilai data dengan banyaknya data. Kemudian nilai tertinggi dalam data yang diteliti disebut maksimum, dan nilai terkecil yang ada dalam data disebut sebagai minimum. Tabel 4.1. menyajikan hasil deskriptif statistik.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.
KEMISINAN (RIBU Jiwa)	10.15786	18.02000	5.300000	3.331255
PDRB (Juta Rupiah)	7667536	11256219	5110297	2037307
Pendidikan (Tahun)	7.955000	10.27000	6.120000	1.075699

INFRASTRUKTUR (KM)	586.7143	943.0000	347.0000	154.3070
PENGELUARAN PEMERINTAH (JUTA RUPIAH)	926557.8	1299819	710661.4	130513.9

Sumber : Olah Data Eviews 12

Tabel 4.1 menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

a) Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen yang mempunyai mean sebesar 10.15786 ribu jiwa dengan std. dev. Sebesar 3.331255. Jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat di Kabupaten Bangka dengan jumlah penduduk miskin sebesar 18.02000 ribu jiwa pada tahun 2018. Sementara jumlah penduduk miskin terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah penduduk miskin sebesar 5.300000 ribu jiwa pada tahun 2020.

b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel independent yang mempunyai nilai mean sebesar 7667536 juta rupiah dengan std. dev. Sebesar 2037307. PDRB tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat di Kabupaten Bangka sebesar 11256219 juta rupiah pada tahun 2022. Sementara PDRB terendah terdapat di Kabupaten Belitung Timur sebesar 5110297 juta rupiah pada tahun 2017.

c) Pendidikan

Pendidikan sebagai variabel independent yang mempunyai nilai mean sebesar 7.955000 tahun dengan std. dev. Sebesar 1.075699. Pendidikan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat di Kota Pangkalpinang sebesar 10.27000 tahun pada tahun 2022. Sementara Pendidikan terendah terdapat di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 6.120000 tahun pada tahun 2017.

d) Infrastruktur

Infrastruktur sebagai variabel independent yang mempunyai nilai mean sebesar 586.7143 Km dengan std. dev. Sebesar 154.3070. Infrastruktur tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat di Kabupaten Bangka Selatan sebesar

943.0000 Km. Sementara infrastruktur terendah terdapat di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 347.0000 Km pada tahun 2017.

e) Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel independent yang mempunyai nilai mean sebesar 926557.8 juta rupiah dengan std. dev. Sebesar 130513.9. Pengeluaran pemerintah tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung terdapat di Kabupaten Bangka sebesar 1299819 juta rupiah pada tahun 2022. Sementara pengeluaran pemerintah terendah terdapat di Kabupaten Belitung Timur sebesar 7106614 juta rupiah pada tahun 2017.

4.2 Estimasi Regresi Data Panel

Common effect model, *fixed effect model*, dan *random effect model* merupakan tiga metode estimasi yang digunakan untuk pengolahan data dengan menggunakan regresi data panel. Model yang dianggap paling efisien atau optimal akan dipilih dan digunakan untuk analisis pengolahan data panel.

4.2.1 Model Common Effect

Model Common Effect, yang hanya mengintegrasikan data cross-sectional dan time series tanpa memperhitungkan aspek individu atau waktu, merupakan salah satu model yang paling mudah dipahami. Dalam hal ini, baik slope time series maupun cross-section data, Untuk setiap kemiringan, koefisien intersepnya sama (Widarjono, 2018). Tabel 4.2 ini menunjukkan hasil estimasi dari pengolahan data model common effect.

Tabel 4.2 Hasil Regresi Model Common Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.93428	3.511600	-4.822384	0.0000
LOG(PDRB)	-0.553651	0.154382	-3.586234	0.0010
LOG(PENDIDIKAN)	0.684383	0.296486	2.308316	0.0267
LOG(INFRASTRUKTUR)	-0.095477	0.142570	-0.669685	0.5072
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH)	1.977493	0.299729	6.597611	0.0000
R-squared	0.630839			

Adjusted R-square	0.590930
F-statistic	15.80682
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Hasil Olah Eviews 12

4.2.2 Model Fixed Effect

Model fixed effect menggunakan teknik yang memperhitungkan variasi intersep sambil mempertahankan kemiringan yang konstan antar unit. Dalam model ini, variabel dummy digunakan untuk mencari perbedaan intersep antar variabel (Widarjono, 2018). Tabel 4.3 menunjukkan hasil estimasi dari pengolahan data model fixed effect.

Tabel 4.3 Hasil Regresi Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.298282	2.859116	2.202878	0.0352
LOG(PDRB)	0.389118	0.26774	1.453344	0.1562
LOG(PENDIDIKAN)	-0.746556	0.428217	-1.743408	0.0912
LOG(INFRASTRUKTUR)	-0.052400	0.080679	-0.649483	0.5208
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH)	-0.605429	0.168564	-3.591688	0.0011
R-squared	0.982294			
Adjusted R-square	0.976582			
F-statistic	171.9801			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olah Eviews 12

4.2.3 Model Random Effect

Model random effect adalah model data panel yang memungkinkan adanya hubungan antar unit dan menggunakan variabel gangguan untuk estimasinya. (Widarjono, 2018). Tabel 4.4 menunjukkan hasil estimasi dari pengolahan data model random effect.

Tabel 4.4 Hasil Regresi Model Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.104619	1.427161	0.073306	0.9420
LOG(PDRB)	-0.374330	0.085933	-4.356094	0.0001
LOG(PENDIDIKAN)	0.731278	0.155062	4.716037	0.0000
LOG(INFRASTRUKTUR)	0.039909	0.059470	0.671075	0.5063
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH)	0.460368	0.114574	4.018098	0.0003
R-squared	0.148786			
Adjusted R-square	0.056763			
F-statistic	1.616838			
Prob(F-statistic)	0.190563			

Sumber : Hasil Olah Eviews 12

4.3 Pemilihan Model

Untuk menemukan model data panel terbaik, maka harus mengestimasi data tersebut dengan uji chow, uji LM, dan uji Hausman.

4.3.1 Uji Chow

Dengan menguji distribusi p-value maka uji Chow dapat digunakan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect dan Fixed Effect. Dalam metode ini, model Common Effect menjadi pilihan terbaik jika nilai probabilitasnya lebih tinggi dari alpha (10%). Namun model Fixed Effect merupakan pilihan terbaik jika nilai probabilitasnya kurang dari alpha (10%). Tabel 4.5. menunjukkan hasil Uji Chow.

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	102.554572	(6,31)	0.0000
Cross-section Chi-square	127.567399	6	0.0000

Sumber : Hasil Olah Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka H_a diterima dan H_0 ditolak karena nilai probabilitas 0.0000 lebih kecil dari alpha 0.01. Oleh karena itu, Fixed Effect merupakan model yang paling tepat.

4.3.2 Uji LM

Metode terbaik untuk menentukan model antara Random Effect dan Common Effect yang optimal adalah dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier. Common Effect merupakan model terbaik jika nilai probabilitas Breusch-Pagan lebih tinggi dari alpha (10%). Model Random Effect paling baik jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari alpha (10%). Tabel 4.6. menunjukkan hasil Uji Lagrange Multiplier.

Tabel 4.6 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.523906 (-0.1121)	24.83191 (0.0000)	27.35582 (0.0000)
Honda	1.588681 (-0.0561)	4.983163 (0.0000)	4.646995 (0.0000)
King-Wu	1.588681 (-0.0561)	4.983163 (0.0000)	4.751398 (0.0000)
Standardized Honda	4.359815 (0.0000)	5.372422 (0.0000)	3.581481 (-0.0002)
Standardized King-Wu	4.359815 (0.0000)	5.372422 (0.0000)	3.614587 (-0.0002)
Gourieroux, et al.	--	--	27.35582 (0.0000)

Sumber : Hasil Olah Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian di atas H_a diterima dan H_0 ditolak karena nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,01. Oleh karena itu, Random Effect merupakan model yang paling tepat.

4.3.3 Uji Hausman

Metode terbaik untuk memilih model antara Fixed Effect dan Random Effect adalah uji Hausman. Model Random Effect merupakan pilihan terbaik jika

nilai probabilitas random cross-section lebih tinggi dari alpha (10%). Untuk nilai probabilitas dibawah alpha (10%), model Fixed Effect adalah yang paling tepat. Tabel 4.7. menunjukkan hasil Uji Hausman.

Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	246.993921	4	0.0000

Sumber : Hasil Olah Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian di atas maka H_0 ditolak dan H_a diterima karena nilai probabilitas random cross-section sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,01. Oleh karena itu, Fixed Effect merupakan model yang paling tepat.

4.4 Evaluasi Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model (FEM)*

Dari estimasi ketiga data tersebut bahwa model yang terpilih adalah Fixed Effect Model

(FEM) yang terbaik.

Tabel 4.8 Hasil Regresi Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.298282	2.859116	2.202878	0.0352
LOG(PDRB)	0.389118	0.267740	1.453344	0.1562
LOG(PENDIDIKAN)	-0.746556	0.428217	-1.743408	0.0912
LOG(INFRASTRUKTUR)	-0.052400	0.080679	-0.649483	0.5208
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH)	-0.605429	0.168564	-3.591688	0.0011
R-squared	0.982294			
Adjusted R-square	0.976582			
F-statistic	171.9801			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olah Eviews 12

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai R-square sebesar 0,9822. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 98,22% variabel dependen atau independen

dapat dijelaskan oleh variabel independen, dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel di luar model.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya variansi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen ditentukan dengan menggunakan penilaian Koefisien Determinasi (R-square). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, Infrastruktur, dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjelaskan variasi karakteristik kemiskinan. Dari hasil regresi model fixed effect di atas didapatkan nilai R^2 yaitu sebesar 0.982294 artinya bahwa variabel independen yaitu PDRB, Pendidikan, Infrastruktur dan Pengeluaran Pemerintah dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Kemiskinan sebesar 98.22%, sedangkan sisanya sebesar 1.78% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara keseluruhan maka dilakukan uji kelayakan model. Mengingat nilai F-statistik sebesar 171,9801 dan probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari alpha 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bersamaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain PDRB, Pendidikan, Infrastruktur, dan pengeluaran Pemerintah.

4.5.3 Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji T)

Uji ini menentukan sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan tingkat probabilitas t-statistik yang dibandingkan dengan alpha 10%. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 10% berarti menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dan jika nilai probabilitas lebih besar dari alpha 10% artinya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu, uji ini juga dapat diuji menggunakan t tabel dan t hitung. Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji t metode fixed effect.

Tabel 4.9 Hasil Uji T

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob	Alpha	Keterangan
LOG(PDRB)	0.389118	1.453344	0.0781	0,1	Signifikan
LOG(PENDIDIKAN)	-0.746556	-1.743408	0.0912	0,1	Signifikan
LOG(INFRASTRUKTUR)	-0.052400	-0.649483	0.5208	0,1	Tidak Signifikan
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH)	-0.605429	-3.591688	0.0011	0,01	Signifikan

Sumber : Hasil Olah Eviews 12

4.5.3.1 Uji t-statistik variabel PDRB

Menurut hasil regresi diatas didapatkan koefisien dari PDRB positif yaitu sebesar 0.389118 dengan probabilitas 0.0781 lebih kecil dari alpha 10% sehingga menunjukkan bahwa variabel PDRB signifikan, artinya variabel PDRB berpengaruh positif dengan jumlah penduduk miskin di Kepulauan Bangka Belitung.

4.5.3.2 Uji t-statistik variabel Pendidikan Rata – Rata Lama Sekolah (X2)

Menurut hasil regresi diatas didapatkan koefisien dari pendidikan negatif yaitu sebesar -0.746556 dengan probabilitas 0.0912 lebih kecil dari alpha 10% sehingga menunjukkan bahwa variabel pendidikan signifikan, artinya variabel pendidikan berpengaruh negatif dengan kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung.

4.5.3.3 Uji t-statistik variabel Infrastruktur Panjang Jalan (X3)

Menurut hasil regresi diatas didapatkan koefisien dari infrastruktur panjang jalan negatif yaitu sebesar -0.052400 dengan probabilitas 0.5208 lebih besar dari alpha 10% sehingga menunjukkan bahwa variabel Infrastruktur panjang jalan tidak signifikan, artinya variabel infrastruktur panjang jalan tidak berpengaruh dengan kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung.

4.5.3.4 Uji t-statistik variabel Pengeluaran Pemerintah (X4)

Menurut hasil regresi diatas didapatkan koefisien dari pengeluaran pemerintah negatif yaitu sebesar -3.591688 dengan probabilitas 0.0011 lebih kecil dari alpha 1% sehingga menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah signifikan, artinya variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dengan kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung.

4.6 Pembahasan Hasil

4.6.1 Perbedaan Intercept

Tabel koefisien model fixed effect Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjelaskan bahwa variabel PDRB, Pendidikan, Infrastruktur, dan Pengeluaran Pemerintah mempunyai hubungan yang berbeda dengan Jumlah Penduduk Miskin di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Table 4.10 Koefisien Model Fixed Effect

Cross ID	Effect	Coefisien	Intercept
Bangka	0.582625	6.298282	6.880907
Belitung	0.452139	6.298282	6.750421
Bangka Barat	-0.71925	6.298282	5.579029
Bangka Tengah	0.010969	6.298282	6.309251
Bangka Selatan	-0.36468	6.298282	5.933600
Belitung Timur	-0.03205	6.298282	6.266229
Pangkalpinang	0.070255	6.298282	6.368537

Sumber : Hasil Olah Eviews 12

Tabel diatas ditunjukkan bahwa di Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota yang dapat menunjukkan adanya intercept positif yaitu, Bangka dengan intercept sebesar 6.880907, Belitung sebesar 6.750421, Bangka Barat sebesar 5.579029, Bangka Tengah sebesar 6.309251, Bangka Selatan sebesar 5.933600, Belitung Timur sebesar 6.266229 dan Pangkalpinang sebesar 6.368537. Hasil dari nilai intercept ini bisa menentukan pengaruh area Jumlah Penduduk Miskin. Nilai intercept Kabupaten Bangka sebesar 6.880907, artinya jika semua variabel PDRB, Pendidikan, Infrastruktur, dan pengeluaran Pemerintah bernilai nol

maka Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bangka 6.880907 ribu jiwa. Maka diurutkan area yang memberi pengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu posisi dua terbaik yaitu Kabupaten Bangka Barat dengan nilai intercept sebesar 5.579029, dan Bangka Selatan sebesar 5.933600. kemudian dua yang terburuk yaitu Kabupaten Bangka dengan nilai intercept sebesar 6.880907 dan Kabupaten Belitung sebesar 6.750421.

4.6.2 Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan

Hasil regresi di atas menggambarkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kepulauan Bangka Belitung. Dengan koefisien 0,389118 dan probabilitas sebesar 0.0781 lebih besar dari alpha 10%, PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan di kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan sebesar 1% pada PDRB akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0.389118 ribu jiwa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nenik Woyanti (2018). Tingkat PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan pertumbuhan ekonomi dominan berkontribusi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan tidak merata. Perkembangan ekonomi yang akan menyebabkan ketimpangan ekonomi di area tersebut jika tidak diikuti dengan pemerataan. Salah satu alasan kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki pendapatan yang merata adalah karena semua uang dan pendapatan hanya mengalir ke masyarakat berpendapatan menengah ke atas.

4.6.3 Analisis Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Hasil regresi di atas menggambarkan bahwa Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di kepulauan Bangka Belitung. Dengan koefisien - 0.746556 dan probabilitas sebesar 0.0912 lebih kecil dari alpha 10%, Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di kepulauan Bangka Belitung. Ini berarti apabila Pendidikan meningkat 1% maka menurunkan Jumlah Penduduk Miskin sebesar 0.746556 ribu jiwa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernanada Andharesta Sukmawijaya (2018) yang menegaskan bahwa rata – rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung. Artinya dalam hal ini bisa dikatakan bahwa investasi dalam

Pendidikan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Jika Pendidikan baik maka masyarakat semakin baik dan Pendidikan dapat menghentikan seseorang dari kemiskinan.

4.6.4 Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Kemiskinan

Hasil regresi di atas menggambarkan bahwa Infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung. Dengan koefisien -0.052400 dan probabilitas sebesar 0.5208 lebih besar dari α 10%, infrastruktur berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini sesuai dengan penelitian Ahmad Ghazi S Amala (2022). Bahwa panjang jalan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, hal ini infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak merata di setiap Kabupaten/Kota. Hasil menunjukkan bahwa kondisi jalan yang berbeda di setiap daerah. Akibatnya pertumbuhan ekonomi di masing – masing Kabupaten/Kota tidak berkembang secara merata dan meningkatkan tingkat kemiskinan karena tidak semua masyarakat menikmati kemajuan infrastruktur.

4.6.5 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Hasil regresi di atas menggambarkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung. Dengan koefisien -3.591688 dan probabilitas sebesar 0.0011 lebih kecil dari α 1%, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kepulauan Bangka Belitung. Artinya apabila Pengeluaran pemerintah meningkat 1% maka dapat menurunkan Jumlah Penduduk Miskin sebesar -3.591688 ribu jiwa dan begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Nengah and Made (2019) yang menegaskan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Jika pengeluaran pemerintah meningkat hal itu akan berdampak pada sector seperti pendidikan dan kesehatan. Ini dikarenakan semakin banyak pengeluaran untuk sector ini akan berdampak pada masyarakat miskin karena mereka akan memiliki akses ke pendidikan, dan kesehatan. Sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka. Selain itu dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan akan ada dampak positif

terhadap para konsumen karena barang yang mereka produksi mengalami peningkatan karena adanya permintaan dari masyarakat miskin.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Menurut temuan dari penelitian dan analisis data yang telah dilakukan terkait PDRB, Pendidikan, Infrastruktur dan Pengeluaran Pemerintah yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017 – 2022, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Variabel PDRB signifikan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan pertumbuhan ekonomi dominan berkontribusi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan tidak merata. Perkembangan ekonomi yang akan menyebabkan ketimpangan ekonomi di area tersebut jika tidak diikuti dengan pemerataan. Salah satu alasan Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki pendapatan yang merata adalah karena semua uang dan pendapatan hanya mengalir ke masyarakat berpendapatan menengah ke atas.
2. Variabel Pendidikan signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan investasi dalam Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Jika Pendidikan baik maka masyarakat semakin baik dan Pendidikan dapat menghentikan seseorang dari kemiskinan.
3. Variabel Infrastruktur tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan dalam hal ini infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak merata di setiap Kabupaten/Kota. Hasil menunjukkan bahwa kondisi jalan yang berbeda di setiap daerah. Akibatnya pertumbuhan ekonomi di masing – masing Kabupaten/Kota tidak berkembang secara merata dan meningkatkan tingkat kemiskinan karena tidak semua masyarakat menikmati kemajuan infrastruktur.
4. Variabel Pengeluaran Pemerintah signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan jika pengeluaran pemerintah meningkat hal itu akan berdampak pada sector seperti Pendidikan dan Kesehatan. Ini dikarenakan semakin banyak pengeluaran untuk

sector ini akan berdampak pada masyarakat miskin karena mereka akan memiliki akses ke Pendidikan, dan Kesehatan. Dengan demikian kualitas sumber daya manusianya akan meningkat. Selain itu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan akan berdampak positif terhadap para konsumen karena barang yang mereka produksi mengalami peningkatan karena adanya permintaan dari masyarakat miskin.

5.2 Implikasi

1. Sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pemerintah seharusnya dapat mempelancar distribusi pendapatan daerah secara merata dan adil kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Dalam upaya meingkatkan PDRB, pemerintah Kabupaten/Kota Bangka Belitung seharusnya mendorong pertumbuhan sector pendapatan dengan mengoptimalkan potensi dalam negeri.
2. Dengan hubungan negative dan signifikan antara Pendidikan dan kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan pemerintah memberi perhatian lebih besar. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah meningkatkan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan sarana dan prasarana terkait pendidikan.. Selain itu diharapkan pemerintah memberi perhatian lebih besar pada biaya sekolah bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu sehingga Pendidikan dapat menjadi lebih merata.
3. Pembangunan Infrastruktur sangat mempengaruhi pertumbuhan dan usaha penanggulang kemiskinan. Diharapkan kemajuan pembangunan infrastruktur di seluruh Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memberikan layanan public dan mendorong perekonomian lokal.
4. Pengeluaran pemerintah sangat penting untuk menurunkan kemiskinan perencanaan dengan cermat dan memfokuskan pada sector daerah yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dengan efektif dan tetap memberi sasaran kepada sector manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdika, M. dan H. Hadi. (2021). Pembelajaran Bernyanyi Secara Daring Di Kelas VIII A SMP Negeri 8 Kota Padang. *Jurnal Sendratasik Vol. 10 No. 2*.
- Amala, G. (2022). Analisis Pengaruh PDRB, Buta Huruf, Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri, Panjang Jalan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015- 2019.
- A.Ridwan Siregar. (2008). Perpustakaan Digital: Implikasinya Terhadap Perpustakaan di Indonesia. *Medan: Universitas Sumatera Utara*.
- Azwar & Subekan, A. (2016). Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Negara*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Potret Perekonomian Makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV 2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.
- Basri, A. F. M., dan R. V. (2005). Performance appraisal. *Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada*.
- Boediono. (1998). Teori Pertumbuhan Ekonomi. *BPFE Yogyakarta*.
- Boediono. (2013). Ekonomi Makro. *BPFE, Yogyakarta*.
- Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia. *Jakarta: Erlangga*.
- Hadiyanti, P. (2006). Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Volume 2, Nomor 1, Juni 2006*.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI SULAWESI UTARA. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 19, Issue 3).
- Jalles, J. T. (2011). Growth, Poverty, and Inequality: Evidence from Post-Communist Economies. *Journal of Poverty*.
- Kraay. (2006). A. When Is Growth Pro-Poor? Cross-Country Evidence. *Journal of Development Economics*.
- Kuncoro, M. (2003). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. *Jakarta: Erlangga*.

- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.*
- Mangkoesebroto, G. (2002). *Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.*
- Mankiw, G. N. (2013). *Teori Makro Ekonomi Terjemahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.*
- Mankiw, N. G. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.*
- Marzuki. (2012). "Pengintegrasian Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran di Sekolah." *FIS-UNY. Yogyakarta.*
- Nadhifah, D. (2018). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan.* Universitas Brawijaya.
- Nasir, M. M. S. & M. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ekskutif. Vol. 5 No. 4.*
- Nengah & Made. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabuapten/Kota di Provinsi Bali.
- Pitriyani et al. (2022). *Infrastruktur dan Kemiskinan : Studi Empiris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*
- Purnomo, S. D. (2019). Determinant Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 11(1), 47-58.*
- Renggapratiwi, A. (2009). Kemiskinan Dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik Dan Respon Kebijakan. *Semarang : Universitas Diponegoro.*
- Rosen, H. S. (2014). *Public Finance, Tenth Edition, Global Edition, the McGraw-Hill Series in Economics.*
- Sadono, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group.*
- Sadono Sukirno. (2000). *Makro Ekonomi Modern. Jakarta : Raja Grafindo Persada.*
- Shiffa & Raja. (2020). Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Listrik, Sekolah, Dan PDRB Terhadap kemiskinan Di Aceh.
- Simatupang, P., & Dermoredjo, S. K. (2003). " Trickle DowrT Dikaji Ulang. In *Ekonomi dan Keuangan Indonesia (Vol. 51, Issue 3).*
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Jakarta Press.*

- Sukirno, S. (2005). Mikro Ekonomi, Teori Pengantar. *Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Sukirno, S. (2013). Makro Ekonomi, Teori Pengantar. *Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Sukma, F.A. (2018). Analisis Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2015.
- Suprijanto, A. (2009). Pendidikan oleh Orang Dewasa; dari Teori Hingga Aplikasi, Bumi Aksara. *Jakarta.*
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. *JMPK.Vol08/No03/September/2005.*
- Tadoro P. Michael. (2015). Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I . *Jakarta Penerbit : Erlangga.*
- Tambunan, T. (2003). Perekonomian Indonesia. Beberapa Masalah Penting. *Ghalia Indonesia : Jakarta.*
- Todaro, M. P. (1994). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedua, terjemahan Haris Munandar. *Penerbit Erlangga, Jakarta. .*
- Tulus H. Tambunan. (2001). Perekonomian Indonesia. *Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.*
- Widarjono, A. (2018). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN.*
- Wongdesmiwati. (2009). “Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika.” *Analisis Ekonometrika.*
- Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah (2011 – 2015).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Data Kemiskinan, PDRB, Pendidikan, Infrastruktur dan
Pengeluaran
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-
2022.

Kabupaten / Kota	Tahun	Kemiskinan (Y)	PDRB (X1)	Pendidikan (X2)	Infrastruktur (X3)	Pengeluaran Pemerintah (X4)
Bangka	2017	16.45	9355325.94	8.19	735	1085985720523.62
Bangka	2018	18.02	9778032.33	8.20	735	1072744879104.72
Bangka	2019	16.52	10058788.63	8.23	735	1242579345311.30
Bangka	2020	15.41	9988799.17	8.24	735	1152653865431.02
Bangka	2021	16.19	10733859.65	8.25	735	1172454542649.56
Bangka	2022	14.50	11256218.82	8.27	735	1299818887715.34
Belitung	2017	14.11	5969672.46	8.11	629	878639555805.40
Belitung	2018	14.00	6290863.35	8.15	666	936660954749.24
Belitung	2019	11.88	6500417.14	8.41	666	1097846810135.57
Belitung	2020	12.06	6352858.79	8.46	666	1032032453295.43
Belitung	2021	13.53	6710006.83	8.47	666	995246173234.00
Belitung	2022	12.34	7093355.47	8.74	666	1073757049247.83
Bangka Barat	2017	6.06	9673708.95	7.06	702	802993544721.81
Bangka Barat	2018	6.35	10177199	7.18	701	820048919889.74
Bangka Barat	2019	5.65	10895222.51	7.21	701	895255933704.49
Bangka Barat	2020	5.83	10312212.39	7.22	701	916167401428.94
Bangka Barat	2021	5.85	10332996.45	7.44	701	876775908193.00
Bangka Barat	2022	5.30	10540422.63	7.46	809	873102056613.69
Bangka Tengah	2017	11.39	5620614.96	6.79	347	772254723298.98

Bangka Tengah	2018	11.12	5812697.46	6.80	347	869574985819.82
Bangka Tengah	2019	9.80	5883095.61	7.13	347	906292386410.40
Bangka Tengah	2020	9.64	5715596.35	7.19	347	908467396988.03
Bangka Tengah	2021	10.03	5987136.71	7.20	441	872571265093.19
Bangka Tengah	2022	9.61	6352639.47	7.22	441	897112819106.00
Bangka Selatan	2017	7.88	5763871.27	6.12	943	789883885112.20
Bangka Selatan	2018	7.58	6024205.32	6.36	634	895183802836.63
Bangka Selatan	2019	7.02	6176844.59	6.42	634	933286337846.00
Bangka Selatan	2020	7.49	6057875.86	6.67	634	791089295192.00
Bangka Selatan	2021	7.72	6276797.99	6.71	634	811979690371.00
Bangka Selatan	2022	6.81	6469331.04	6.89	634	932143094492.20
Belitung Timur	2017	8.44	5110296.8	8.00	481	710661361410.18
Belitung Timur	2018	8.93	5326115.79	8.14	481	815705531387.94
Belitung Timur	2019	8.51	5499978.38	8.15	481	865889382198.07
Belitung Timur	2020	8.56	5465459.44	8.22	481	774272054766.96
Belitung Timur	2021	9.29	5714794.2	8.47	481	839999151457.93
Belitung Timur	2022	8.47	5931759.93	8.67	752	875849073729.11
Pangkalpinang	2017	9.76	8358481.92	9.77	403	816819790495.26
Pangkalpinang	2018	10.27	8782788.55	9.78	403	883544427973.98
Pangkalpinang	2019	9.00	9069279.72	9.80	403	954727423814.72
Pangkalpinang	2020	9.40	8797128.81	9.92	403	887559906542.61
Pangkalpinang	2021	10.10	9611439.98	10.13	403	903107395502.70
Pangkalpinang	2022	9.76	10208340.29	10.27	403	982688383730.00

LAMPIRAN 2: Common Effect Model

Dependent Variable: LOG(KEMISINAN__Y_)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/22/23 Time: 10:00

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.93428	3.511600	-4.822384	0.0000
LOG(PDRB__X1_)	-0.553651	0.154382	-3.586234	0.0010
LOG(PENDIDIKAN__X2_)	0.684383	0.296486	2.308316	0.0267
LOG(INFRASTRUKTUR__X3_)	-0.095477	0.142570	-0.669685	0.5072
LOG(PP)	1.977493	0.299729	6.597611	0.0000
Root MSE	0.193913	R-squared		0.630839
Mean dependent var	2.267200	Adjusted R-squared		0.590930
S.D. dependent var	0.323022	S.E. of regression		0.206600
Akaike info criterion	-0.204719	Sum squared resid		1.579295
Schwarz criterion	0.002147	Log likelihood		9.299089
Hannan-Quinn criter.	-0.128894	F-statistic		15.80682
Durbin-Watson stat	1.120674	Prob(F-statistic)		0.000000

LAMPIRAN 3: Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(KEMISINAN__Y_)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/22/23 Time: 10:02

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.298282	2.859116	2.202878	0.0352
LOG(PDRB__X1_)	0.389118	0.267740	1.453344	0.1562
LOG(PENDIDIKAN__X2_)	-0.746556	0.428217	-1.743408	0.0912
LOG(INFRASTRUKTUR__X3_)	-0.052400	0.080679	-0.649483	0.5208
LOG(PP)	-0.605429	0.168564	-3.591688	0.0011

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.042468	R-squared	0.982294
Mean dependent var	2.267200	Adjusted R-squared	0.976582
S.D. dependent var	0.323022	S.E. of regression	0.049432
Akaike info criterion	-2.956323	Sum squared resid	0.075748
Schwarz criterion	-2.501219	Log likelihood	73.08279
Hannan-Quinn criter.	-2.789510	F-statistic	171.9801

LAMPIRAN 4: Random Effect Model

Dependent Variable: LOG(KEMISINAN__Y_)
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 11/22/23 Time: 10:03
Sample: 2017 2022
Periods included: 6
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 42
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.104619	1.427161	0.073306	0.9420
LOG(PDRB__X1_)	-0.374330	0.085933	-4.356094	0.0001
LOG(PENDIDIKAN__X2_)	0.731278	0.155062	4.716037	0.0000
LOG(INFRASTRUKTUR__X3_)	0.039909	0.059470	0.671075	0.5063
LOG(PP)	0.460368	0.114574	4.018098	0.0003
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.046135	0.4655
Idiosyncratic random			0.049432	0.5345
Weighted Statistics				
Root MSE	0.127631	R-squared		0.148786
Mean dependent var	0.908598	Adjusted R-squared		0.056763
S.D. dependent var	0.140013	S.E. of regression		0.135981
Sum squared resid	0.684163	F-statistic		1.616838
Durbin-Watson stat	0.626302	Prob(F-statistic)		0.190563
Unweighted Statistics				
R-squared	0.340051	Mean dependent var		2.267200
Sum squared resid	2.823305	Durbin-Watson stat		0.151770

LAMPIRAN 5: Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	102.554572	(6,31)	0.0000
Cross-section Chi-square	127.567399	6	0.0000

LAMPIRAN 6: Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.523906 (0.1121)	24.83191 (0.0000)	27.35582 (0.0000)
Honda	1.588681 (0.0561)	4.983163 (0.0000)	4.646995 (0.0000)
King-Wu	1.588681 (0.0561)	4.983163 (0.0000)	4.751398 (0.0000)
Standardized Honda	4.359815 (0.0000)	5.372422 (0.0000)	3.581481 (0.0002)
Standardized King-Wu	4.359815 (0.0000)	5.372422 (0.0000)	3.614587 (0.0002)
Gourieroux, et al.	--	--	27.35582 (0.0000)

LAMPIRAN 7: Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RANDOM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	246.993921	4	0.0000